



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU HERMAWANTO
Jabatan : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,

Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertahanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

HERU HERMAWANTO
NIP 196803121998031010

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama Heru Hermawanto
 NIP 196603121990034040
 Jabatan Kepala Dinas
 Unit Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	1	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	e SAKIP	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan pada Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ Rencana aksi yang dilaksanakan diantaranya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan Batching Plant dan penindakan pelanggaran atas kepatuhan membangun Cara perhitungan Selisih antara implementasi dengan rencana dibagi dengan rencana dengan menggunakan paramater subzona/kegiatan sesuai perda RDTR & PZ	N/A	N/A	N/A	39%	39%	Persen
2	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase gedung pemda yang memenuhi standar	e SAKIP	Gedung Pemda memenuhi standar adalah bangunan gedung pemda sesuai fungsi dan layak secara struktur dan ME yang dikelompokkan menjadi a Bangunan gedung sederhana bertingkat paling tinggi 4 lantai yang berumur sampai dengan 25 tahun b Bangunan gedung tidak sederhana bertingkat lebih dair 4 tahun yang berumur sampai dengan 25 tahun Cara Perhitungan Rasio Gedung pemda sesuai standar pada kondisi akhir tahun dengan kondisi awal tahun	N/A	N/A	N/A	58%	58%	Persen

3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU dan tidak termasuk dana transfer dan pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD.</p> <p>Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$</p> <p>2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$ Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p> <p>3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ namun output $< 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
4	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	100%	100%	100%	N/A	100%	Persentase
5	Meningkatnya akses sanitasi layak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
6	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	100%	N/A	100%	100%	100%	Persentase

7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman memadai modern terintegrasi ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (nomor 28)	e Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) (nomor 28)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (nomor 30)	e Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (nomor 30)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (nomor 31)	e Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (nomor 31)	N/A	100%	100%	N/A	100%	Persentase
		4	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	e Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	100%	100%	N/A	100%	Persentase
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	e Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	e Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
9	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	e Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni tertata rapi dan berkelanjutan benkut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	e Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	e Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
12	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53)	e Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53)	100%	100%	N/A	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim nomor (72)	e Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor(72)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

13	Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta (nomor 70)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta (nomor 70)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
SASARAN KHUSUS											
14	Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Bangunan Gedung Pemda	1	Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai SOP	e-Kinerja	Jumlah penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait bangunan gedung pemda yang tepat waktu sesuai dengan SOP dibagi jumlah permohonan masuk yang lengkap dikali 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Terselesaikannya Rekomendasi teknis terkait Trase	1	Persentase penyelesaian rekomendasi teknis terkait trase yang tepat waktu sesuai SOP	e-Kinerja	Jumlah penyelesaian Rekomendasi Teknis terkait Trace yang tepat waktu sesuai dengan SOP dibagi permohonan masuk yang lengkap dikali 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
16	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100% Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan keandalan sistem pengendalian internal kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemerksaan LK. WTP=3(100%) WDP=2(75%) TW=1(50%) TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP

18	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi</p> <p>c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang</p> <p>Perhitungan</p> <p>a) Bobot 30% PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan</p> <p>b) Bobot 20% PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan</p> <p>c) Bobot 20% PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan</p> <p>d) Bobot 30% PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note realisasi editorial plan min 15 materi per triwulan)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	e Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai 81)	N/A	N/A	N/A	A (81)	A (81)	Predikat

20	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	e Kinerja	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Cara penghitungan Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut AA = >90 100 A = >80 90 BB = >70-80 B = >60 70 CC = >50-60 C = >30 50 D = 0 30	N/A	N/A	N/A	92	92	Nilai
SASARAN OPERASIONAL											
21	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim e-office arahan melalui media elektronik dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
22	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
23	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta



Anies Rasyid Baswedan, Ph D

Jakarta 2021
Kepala Cipta Karya Tata Ruang
dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta



Heru Hermawanto
NIP 196803121998031010